

**EVALUASI *WEBSITE* PEMERINTAH PROVINSI
DENGAN PENDEKATAN *E-GOVERNMENT MATURITY*
*MODELS***

**(Analisis Konten pada Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh:

KEVIN BONA CHRISTY

NIM. 07011281924110

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

JULI 2023

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**EVALUASI *WEBSITE* PEMERINTAH PROVINSI
DENGAN PENDEKATAN *E-GOVERNMENT*
*MATURITY MODELS***

(Analisis Konten pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta)

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Administrasi Publik**

Oleh :

Kevin Bona Christy

NIM 07011281924110

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 18 Juli 2023

Pembimbing



Anang Dwi Santoso, S.AP., MPA

NIP. 199310072019031012

**Mengetahui,
Ketua Jurusan,**



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI
EVALUASI WEBSITE PEMERINTAH PROVINSI DENGAN
PENDEKATAN E-GOVERNMENT MATURITY MODELS
(ANALISIS KONTEN PADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA
SELATAN, JAWA BARAT, DAN DI YOGYAKARTA)

Skripsi

Oleh :

KEVIN BONA CHRISTY
NIM. 07011281924110

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 25 Juli 2023

Pembimbing :

i. Anang Dwi Santoso, S.AP., MPA
NIP. 199310072019031012

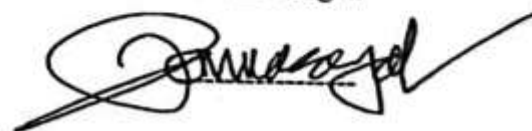
Tanda Tangan



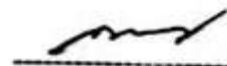
Penguji :

1. Januar Eko Aryansyah, S.IP., SH., M.SI
2. NIP. 198827012019031005

Tanda Tangan



3. Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001




Dekan FISIP UNSRI,
Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Mengetahui,


Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Publik,
Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kevin Bona Christy

Nim : 07011281924110

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi saya yang berjudul “Evaluasi *Website* Pemerintah Provinsi Dengan Pendekatan *E-Government Maturity Models* (Analisis Konten pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta)” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Apabila kemudian hari ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengadua dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan,

Indralaya, 3 Juli 2023



Kevin Bona Christy

Nim. 07011281924110

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

”Aku tahu, bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana-Mu yang gagal”.
(Ayub 42:2)

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang Tua.
2. Seluruh keluarga besar yang saya cintai.
3. Dosen dan Staf Pegawai FISIP Unsri yang saya hormati.
4. Teman dan Rekan Seperjuangan Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2019.
5. Almameter Kebangganku.

ABSTRACT

This study examines the evaluation of provincial government websites with the e governance maturity models in the provincial government of West Java, Yogyakarta Special Region, and South Sumatra. The problems identified are related to website evaluation government. These problems include catalog, transaction, vertical problems integration, and horizontal integration. This research uses descriptive quantitative method with data collection techniques using web attribute analysis, and content analysis. This study uses Layne and Lee's filing theory with an e-government maturity models where there are 4 aspects in evaluating websites namely catalog, transaction, vertical integration, and horizontal integration. The results of this study mentioned that the provincial government website features were still not optimal. That matter because there are still problems related to aspects of the transaction feature that are still not resolved complete, vertical integration, and horizontal integration which still have many deficiencies. Suggestion that can be conveyed by the author is to improve the quality of human resources work at the South Sumatra Communications and Information Service in order to complete lack of features of the South Sumatra provincial government website, which is useful for increasing the effectiveness and efficiency in facilitating e-government in the Province of South Sumatra .

Keywords: Evaluation, website.

Advisor,



Anang Dwi Santoso. S.AP., MPA

NIP. 199310072019031012

Palembang, July 2023

Head of the Department of Public Administration

Faculty of Social Science and Political Science University of Sriwijaya



Dr. M. Nur. Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 19691110994011001

ABSTRAK

Penelitian ini menguji tentang evaluasi *website* pemerintah provinsi dengan model pendekatan *egovernment maturity models* pada pemerintah provinsi Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sumatera Selatan. Masalah yang diidentifikasi berkaitan dengan evaluasi *website* pemerintahan. Masalah-masalah ini mencakup masalah *catalogue*, *transaction*, *vertical integration*, dan *horizontal integration*. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan *analyse web attribute*, dan analisis konten. Penelitian ini menggunakan teori pengarsipan Layne dan Lee dengan model pendekatan *egovernment maturity models* yang mana ada 4 aspek dalam melakukan evaluasi *website* yakni *catalogue*, *transaction*, *vertical integration*, dan *horizontal integration*. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa fitur *website* pemerintah provinsi masih belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan masih ditemukan masalah berkaitan dengan aspek fitur *transaction* yang masih belum lengkap, *vertical integration*, dan *horizontal integration* yang masih banyak kekurangan. Saran yang dapat disampaikan penulis adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bekerja pada Dinas Komunikasi dan Informasi Sumatera Selatan agar dapat melengkapi kekurangan fitur *website* pemerintah provinsi Sumatera Selatan, yang berguna untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kemudahan *e-government* pada Provinsi Sumatera Selatan.

Kata Kunci : Evaluasi, *website*.

Pembimbing,



Anang Dwi Santoso, S.AP.,MPA
NIP. 199310072019031012

Palembang, Maret 2023
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Dr. M. Nur. Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 19691110994011001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan Yang Maha Esa karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat kurikulum di Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Penulisan proposal usulan skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa kontribusi, arahan, serta bimbingan dari semua pihak yang mendukung penulis. Dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. M Nur Budiyanto, S. Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
3. Kedua Orang Tua tercinta yang tidak henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan baik secara materil maupun moril.
4. Bapak Anang Dwi Santoso, SAP, MPA selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak sekali arahan, masukan, dan bimbingannya.
5. Bapak Januar Eko Aryansyah, S. IP., SH., M. Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini.
6. Seluruh pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu menyelesaikan proposal usulan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan karunia, limpahan rahmat dan hidayah-Nya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis

menyadari bahwa proposal usulan skripsi ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi isi maupun teknik penulisan. Maka dari itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna perbaikan penulis dimasa yang akan datang.

Indaralaya, Juli 2023

Kevin Bona Christy

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Landasan Teori.....	13
2.1.1 Kebijakan Publik.....	13
2.1.2 Pengertian Evaluasi.....	15
2.1.3 Fungsi Evaluasi.....	17
2.1.4 Tujuan Evaluasi.....	18
2.1.5 Jenis Evaluasi.....	19
2.1.6 Model Evaluasi Menurut Layne and Lee (2001).....	20
2.1.7 Pengertian <i>E-Government</i>	22
2.1.8 Pengertian Pengembangan <i>E-Government</i>	24
2.1.9 Pengertian <i>Website</i>	28
2.1.10 Peningkatan <i>E-Government index</i>	29
2.2 Penelitian Terdahulu.....	30
2.3 Kerangka Berpikir.....	34
BAB III.....	35
METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Jenis Penelitian.....	35
3.2 Definisi Konsep.....	35

3.3 Definisi Operasional.....	36
3.4 Jenis Dan Sumber Data.....	39
3.5 Sampel.....	40
3.6 Teknik Pengumpulan Data	40
3.7 Teknik Analisis Data	41
3.8 Hasil Uji Validitas dan Reabilitas.....	45
BAB IV.....	46
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46
4.1 Gambaran Umum Tempat Dite liti	46
4.1.1 Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Selatan	46
4.1.2 Struktur Organisasi	47
4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	49
4.2 Profile Website.....	51
4.2.1 Website Sumatera Selatan	51
4.2.2 <i>Website</i> Daerah Istimewa Yogyakarta	53
4.2.3 <i>Website</i> Jawa Barat	54
4.3 Website Analyze Attribute	55
BAB V.....	92
PENUTUP	92
5.1 Kesimpulan	92
5.2 Saran Praktis	92
5.3 Saran Penelitian.....	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	30
Tabel 2. Definisi Oprasional	36
Tabel 3. <i>website</i> sumatra selatan.....	55
Tabel 4. <i>website</i> Jawa Barat.....	63
Tabel 5. <i>website</i> Daerah Istimewa Yogyakarta.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Halaman Depan <i>Website</i>	4
Gambar 2. Halaman Utama <i>Website</i>	6
Gambar 3. <i>Website</i> Daerah Istimewa Yogyakarta.....	7
Gambar 4. <i>Website</i> Jawa Barat.....	9
gambar 5. <i>Website</i> Sumatera Selatan.....	78
gambar 6. <i>Website</i> Sumatera Selatan	78
gambar 7. <i>Website</i> Sumatera Selatan.....	79
gambar 8. <i>Website</i> Sumatera Selatan.....	79
gambar 9. <i>Website</i> Jawa Barat.....	80
gambar 10. <i>Website</i> Jawa Barat.....	81
gambar 11. <i>Website</i> Jawa Barat.....	82
gambar 12. <i>Website</i> Jawa Barat.....	82
gambar 13. <i>Website</i> Jawa Barat.....	83
gambar 14. <i>Website</i> Jawa Barat.....	83
gambar 15. <i>Website</i> Yogyakarta.....	84
gambar 16. <i>Website</i> Yogyakarta.....	85
gambar 17. <i>Website</i> Yogyakarta.....	86
gambar 18. <i>Website</i> Yogyakarta.....	86
gambar 19. <i>Website</i> Yogyakarta.....	87
gambar 20. <i>Website</i> Yogyakarta.....	87
gambar 21. Persentase Keberhasilan	90

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.Kartu Bimbingan	96
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian	97
Lampiran 3 Similarity.....	98

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APJII	: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia
AVE	: <i>Average Variance Extracted</i>
DIY	: Daerah Istimewah Yogyakarta
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ITE	: Informasi dan Transaksi Elektronik
KOMINFO	: Komunikasi dan Informatika
KIP	: Keterbukaan Informasi Publik
KOPRI	: Korps Pegawai Republik Indonesia
PeGI	: Peningkatan <i>e-Government</i> Index
PKK	: Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
PLS	: <i>Partial Least Square</i>
PUSDALOP	: Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana
PPID	: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
SAMSAT	: Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
SEM	: <i>Structural Equation Modeling</i>
SIM	: Surat Izin Mengemudi
STNK	: Surat Tanda Nomor Kendaraan
TIK	: Teknologi Informasi dan Komunikas
UKM	: Usaha Kecil Menengah
UU	: Undang- Undang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era modern ini penggunaan teknologi informasi dan komunikasi merupakan hal yang wajib diterapkan pada pemerintahan di Indonesia, maka dari itu pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai payung hukumnya yakni Instruksi Presiden No 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak atas Kekayaan dan Intelektual, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, saat ini pemerintah kota dan provinsi di Indonesia menggalakan *Electronic Government* untuk meningkatkan pelayanan serta memantau perkembangan dan kebutuhan para penduduk di daerahnya masing-masing. Melalui evaluasi yang terus menerus diharapkan *E-Government* ini dapat berkembang pesat di Indonesia.

Evaluasi memiliki pengertian yang berhubungan dengan masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil suatu kebijakan dan kegiatan atau program. Evaluasi mencakup kritik, klarifikasi, kesimpulan, perumusan dan penyesuaian masalah kembali (Dunn, 2000). Evaluasi juga merupakan suatu bentuk aktivitas atau kegiatan mencakup substansi, imlementasi, dampak, dan estimasi atau penilaian kebijakan (Anderson dalam Winarno, 2012). Terdapat beberapa model evaluasi

dalam pengukuran evaluasi *e-governemnt*. Dalam studi evaluasi tahapan *e-government*, Model yang dikembangkan oleh Layne & Lee (2001) merupakan model yang banyak dikutip dan digunakan dalam Secara keseluruhan model tahapan *e-Government* yang mereka buat berisikan empat tingkatan: 1) *catalouge*; 2) *transaction*; 3) *vertical integration*; dan 4) *horizontal integration*.

Electric Govenrment (E-government) didefinisikan sebagai pemanfaatan teknologi informasi guna mendorong dan mengembangkan efisiensi layanan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat, karyawan, bisnis dan instansi lain (Carter dan Belanger, 2005). *E-Government* telah diadopsi oleh pemerintah di seluruh dunia sebagai digitalisasi dalam bidang produksi, transmisi, dan pertukaran informasi yang lebih mudah. *E-governemnt* membuat lebih banyak saluran komunikasi dan memberi warga negara akses yang lebih besar ke pejabat pemerintah daripada sistem birokrasi tradisional (Coursey dan Norris,2007). Pemerintah Indonesia juga telah menerapkan *E-Government* dalam sistem pemerintahan saat ini. Sehingga salah satu fokus pemerintah saat ini adalah menghasilkan kualitas *E-Government* yang memiliki standar yang baik. Salah satu solusi yang diperoleh pemerintah Indonesia adalah membuat pemeringkatan terhadap hasil dari *E-governemnt* yang dikelola tiap daerah. Kegiatan ini dinamakan Pemeringkatan *Electronic Government Index* (PeGi).

Pemeringkatan *e-Government Index* (PeGI) merupakan kegiatan yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Aplikasi dan Telematika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian KOMINFO) yang melibatkan banyak instansi Pemerintah di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan PeGi ini merupakan kegiatan yang diadakan dalam rangka guna melihat peta kondisi penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh lembaga pemerintah secara nasional. Intinya tujuan dari

kegiatan PeGi ini adalah menilai sejauh mana perkembangan *E-Government* pada tiap instansi. PeGi diharapkan dapat memberikan dorongan kepada pengelola *E-Government* tiap daerah untuk dapat mengevaluasi sistem *E-Government* mereka agar lebih baik kedepannya.

Provinsi Sumatera Selatan merupakan provinsi di Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar, hal ini juga diiringi oleh aktivitas pengguna internet yang banyak pula pada Provinsi Sumatera Selatan, menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) ada sekitar 7 juta jiwa yang menggunakan internet di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2022. Dengan besarnya pengguna internet pada Provinsi Sumatera Selatan maka dapat dikatakan daerah Provinsi Sumatera Selatan telah terkoneksi internet dengan baik. Selain itu pada tahun 2022, Provinsi Sumatera Selatan mendapat *digital award star 4* oleh *IT Works* Jakarta, hal ini dikarenakan terobosan Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru, yang berhasil menyediakan jaringan internet hingga ke daerah terdalam Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu pemanfaatan media elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan pada Provinsi Sumatera Selatan seharusnya menjadi peluang yang baik bagi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Terlebih lagi dengan luasnya wilayah Provinsi Sumatera Selatan, dan sebagian besar keperluan kepengurusan administrasi diurus di kota Palembang, dengan adanya pemanfaatan media elektronik berupa *website* ini bisa menjadi solusi untuk mempermudah kepengurusan administrasi bagi masyarakat yang lokasi tempat tinggalnya jauh dari kota Palembang.

Website merupakan salah satu aplikasi *e-Government* yang diterapkan baik itu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan bahkan Organisasi Perangkat Daerah. Pemerintah baik secara terpusat maupun regional, memiliki domain situs *website*

sendiri untuk menyediakan akses publik kepada masyarakat. Situs *website* sektor publik berperan penting untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik serta sebagai sarana dalam menyajikan audiens yang lebih efisien dan efektif terkait struktur proses informasi dan berbagai produk serta saluran yang bertujuan dalam berinteraksi dengan pemerintah. Melalui upaya penyediaan informasi yang berkualitas dalam situs *website* tersebut, situs *website* pemerintah interaktif mendorong partisipasi warga yang lebih besar dalam pengambilan keputusan (Carter dan Belanger, 2005), meningkatkan kepuasan dan kepercayaan warga pemerintah, dan meningkatkan tingkat akuntabilitas oleh instansi pemerintah (Wong dan Welch, 2004).

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sendiri memiliki *website* resmi dengan domain sumselprov.go.id, yang dimana *website* ini bertujuan untuk menyediakan informasi terkait perkembangan, kondisi, serta kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Gambar 1. Halaman Depan *Website*



Sumber: sumselprov.go.id

Halaman depan *website* Provinsi Sumatera Selatan memiliki fitur cepat yang memuat lima informasi utama yang dapat langsung di akses oleh pengguna, antara lain adalah informasi mengenai transparansi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), aplikasi publik, dan layanan publik. Fitur lengkap dapat diperoleh jika kita menuju menu utama *website*, didalam menu utama *website* terdapat delapan menu utama yang memiliki sub-menu masing-masing. Menu yang pertama adalah menu konten yang memiliki sub-menu tentang informasi (Gubernur, Wakil Gubernur, Sekertaris Daerah, Struktur Organisasi, Sejarah Sumatera Selatan Visi dan Misi, dan Lambang Daerah Sumatera Selatan)

Setelah itu pada menu kedua adalah menu pemerintah yang memiliki sub-menu informasi tentang dinas-dinas pemerintah sekretariat daerah, dinas (seluruh dinas yang ada di Sumatera Selatan), badan (seluruh badan yang ada di Sumatera Selatan), kabupaten/kota, satuan polisi pamong praja, inspektorat daerah, rumah sakit Ernaldi Bahar, sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia atau KOPRI, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tim penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK, dan dewan kesenian).

Menu ketiga adalah menu potensi pada menu ini berisikan informasi mengenai sumber daya alam yang potensial di Sumatera Selatan, yang berguna untuk mendorong laju investasi untuk wilayah Sumatera Selatan, pada menu potensial memiliki sub-menu (sumber daya alam, industri kreatif, pariwisata, investasi, dan seni budaya). Lalu, menu pelayanan dalam menu ini memuat informasi tentang dinas pelayanan yang ada di Sumatera Selatan, menu pelayanan ini memiliki sub-menu (fasilitas umum, pelayanan kesehatan, perizinan, Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau SAMSAT, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), produk hukum.

Berikutnya menu ke lima adalah menu ekonomi, pada menu ini memberikan informasi tentang keuangan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, pada menu ekonomi memiliki sub-menu (bank, usaha kecil menengah (UKM), otoritas jasa keuangan, koperasi, sekuritas, pegadaian, dan *money changer*) selanjutnya pada menu ke enam memuat menu informasi, dalam menu tersebut memuat tentang harga bahan pokok dan juga media televisi, pada menu informasi ini memiliki sub-menu (harga mas, harga pangan, harga tiket dan jadwal pesawat, harga tiket dan jadwal kereta api, media televisi, serta hotel). Selanjutnya terdapat menu berita yang memuat tentang seputar informasi terkini di wilayah Sumatera Selatan, dan yang terakhir adalah menu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) memuat tentang informasi anggaran tiap tahun yang diperoleh Provinsi Sumatera Selatan.

Gambar 2. Halaman Utama *Website*



Sumber : sumselprov.go.id

Website Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memang dapat dikatakan memiliki banyak fitur seperti yang sudah dijelaskan diatas, tetapi jika dibandingkan dengan Provinsi lain di Indonesia, *website* Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ini masih tergolong *website* standar. Dapat dilihat, *website* Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak termasuk sebagai *website* terbaik dalam ajang Malam Anugerah Media

Humas 2022 oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pemenang dalam ajang tersebut adalah *website* Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Gambar 3. *Website* Daerah Istimewa Yogyakarta



Sumber : jogjaprov.go.id

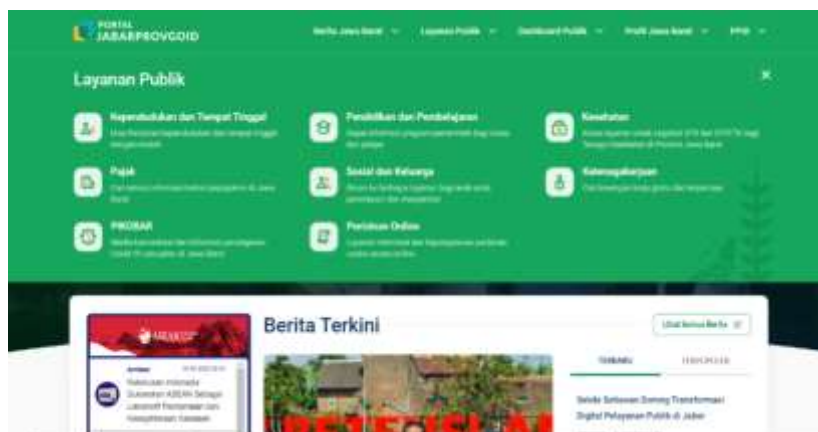
Website yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memang mengungguli *website* provinsi lain di Indonesia, baik dari segi fitur maupun desain. Desain yang *simple* dan fitur yang lengkap menjadikan *website* DIY memenangkan penghargaan Anugerah Media Humas 2022. Tampilan utama *website* langsung disuguhkan berbagai fitur yang lengkap dan memudahkan para pengguna baru untuk mencari data yang diinginkan. Ada beberapa fitur yang belum dimiliki oleh *website* Provinsi Sumatera Selatan, contohnya adalah jogjawara, pendidikan, tanggap darurat, lapor dan warga. Dalam menu jogjawara, menyediakan berbagai data tentang kebijakan terbaru, rencana pembangunan, anggaran, dan berbagai data kependudukan. Menu jogjawara memiliki sub-menu yaitu produk hukum (berisi tentang instruksi atau kebijakan gubernur terbaru), perencanaan pembangunan, transparansi anggaran (berisi tentang laporan keuangan DIY), dan jogja data (berisi tentang data kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan angka kematian bayi). Selanjutnya adalah menu

pendidikan berisi informasi tentang layanan pendidikan di Yogyakarta serta konten pembelajaran oleh “Jogja Belajar”, Jogja Belajar merupakan salah satu unggulan *Digital Government Services* sebagai bagian *Jogja Smart Province* dengan berbagai layanan *online* yang meliputi konten pembelajaran multimedia, video dan audio siaran radio *streaming*, konten-konten budaya dan layanan pembelajaran secara *online*. Sub-menu dari menu pendidikan ini adalah izin penelitian, Jogja Belajar, data pendidikan, serta institut seni Indonesia.

Selanjutnya terdapat menu tanggap darurat fitur ini berguna untuk layanan pengaduan jika terjadi bencana pada daerah Yogyakarta, sub-menu dari menu tanggap darurat ini adalah Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau PUSDALOP. Menu selanjutnya adalah menu warga, pada menu ini terdapat data yang berkenaan tentang kependudukan, sub-menu dari menu warga adalah info kependudukan (Nomor Induk Kependudukan, Nomor Kartu Keluarga, kondisi geografis Yogyakarta, dan peta persebaran penduduk di Yogyakarta), dan ada fitur CCTV yang berguna untuk melihat aktivitas warga jika terjadi sesuatu. Selanjutnya ada fitur lapor, fitur ini sangat penting sebagai media utama masyarakat untuk berkomunikasi dengan pemerintah, fitur ini berguna sebagai tempat pengaduan dan saran jika terjadi keluhan atau masalah yang terjadi di daerah Yogyakarta. Fitur kesehatan pun juga didesain lebih optimal pada *website* Daerah Istimewa Yogyakarta, karena pada fitur kesehatan ini, disediakan fitur konsultasi, serta langsung diberikan *contact person* pihak rumah sakit jika terjadi sesuatu yang darurat, selain itu juga ada fitur layanan pelatihan kesehatan yang bekerja sama dengan Badan Pelatihan Kesehatan Yogyakarta.

Selanjutnya adalah *website* Provinsi Jawa barat, provinsi Jawa Barat menempati peringkat kedua dalam Malam Anugerah Media Humas 2022, hal ini dapat dilihat dari kelengkapan fitur yang dimiliki dalam *website* Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Gambar 4. *Website* Jawa Barat



Sumber : jabarprov.go.id

Dapat dilihat pada gambar diatas, dari segi fitur *website* Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih mengungguli *website* Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan juga ada beberapa fitur unggulan dalam *website* Pemerintah Provinsi Jawa Barat, seperti fitur pajak, perizinan *online* dan ketenagakerjaan. Sesuai namanya, dalam menu pajak ini kegunaannya untuk membayar pajak secara *online*, menu ini sangat membantu dan jarang *website* pemerintah provinsi lain yang memiliki fitur serupa, tetapi fitur ini masih baru dan masih dalam tahap pengembangan, jadi fitur layanan pajak ini baru bisa melakukan pembayaran kendaraan bermotor saja. Selanjutnya fitur perizinan *online*, fitur ini sangat memberi poin positif bagi *website* pemerintah provinsi jawa barat, fitur ini sangat membantu masyarakat dalam melakukan perizinan kepada pemerintah, selain meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, fitur ini juga

meningkatkan transparansi karena seluruh perizinin dijamin gratis tidak dipungut biaya, terdapat 100 perizinan yang dapat diurus dalam fitur ini, selain itu ada fitur cek status izin, dan pengaduan *online* jika terjadi kendala dalam melakukan perizinan.

Selanjutnya adalah fitur ketenagakerjaan, fitur ini sangat membantu masyarakat dalam mencari lowongan kerja, karena dalam fitur ini menyajikan informasi lowongan kerja yang bersih dan dapat dipercaya, selain menyajikan informasi mengenai lowongan kerja, fitur ini juga menyediakan lowongan magang bagi para pelajar, tes minat bakat untuk menyesuaikan jenis pekerjaan yang sesuai "*right man in the right place*", selain itu ada fitur kewirausahaan yang fungsinya untuk membimbing para pengusaha muda untuk dapat mengembangkan usaha mereka dan menyediakan pendamping usaha yang *expert* serta meningkatkan relasi usaha, dan yang terakhir adalah tersedianya fitur informasi tentang beasiswa pendidikan, dalam fitur ini tersedia seluruh informasi tentang beasiswa di Jawa Barat, baik beasiswa dalam negeri maupun luar negeri.

Berdasarkan hasil observasi, *website* Provinsi Sumatera Selatan masih kurang dalam kelengkapan fitur, belum tersedianya sumber daya manusia yang dapat cakap dalam melakukan melengkapi fitur *website* menjadi masalah utama dari perkembangan *website* Provinsi Sumatera Selatan. Dalam konteks ini memperlihatkan bahwasanya evaluasi sangat diperlukan untuk memajukan sistem *website* provinsi Sumatera Selatan.

Melihat fenomena ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mengevaluasi kualitas *website* guna memaksimalkan kinerja *website* secara efektif dan efisien. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk

meneliti lebih lanjut tentang evaluasi kinerja *website* pada Provinsi Sumatera Selatan. Untuk melihat bagaimana pengembangan evaluasi ini maka peneliti menggunakan dimensi yang mengacu pada (Layne & Lee, 2001) dimana terdapat empat elemen yang penting dalam evaluasi *e-Government* yakni 1) *catalouge*; 2) *transaction*; 3) *vertical integration*; dan 4) *horizontal integration*. Keempat elemen ini, merupakan elemen penting dalam keberhasilan evaluasi. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk dilakukannya penelitian. Berdasarkan permasalahan yang terjadi terkait evaluasi pada *website* Provinsi Sumatera Selatan maka perlu dilakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Website Pemerintah Provinsi dengan Pendekatan E-government maturity models”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah yang akan diangkat dalam tulisan ini yaitu Bagaimana Evaluasi *Website* Pemerintah Provinsi dengan Pendekatan *E-government maturity models*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ditelah uraikan diatas, tujuan penulisan ini yaitu untuk mengevaluasi Website Pemerintah Provinsi dengan *Pendekatan E-government maturity models*

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan ini dikelompokan menjadi dua jenis manfaat yang dapat dilihat dari segi teoritis dan praktis yaitu:

- a. Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik khususnya terkait evaluasi *e-Government* dan untuk referensi penelitian selanjutnya yang sejenis.
- b. Praktis Diharapkan tulisan ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah Provinsi Sumatera dalam evaluasi kinerja *website*

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyudi, Aini, Ibnu. (n.d.). *Evaluasi Website Pemerintah Kota Prabumulih Melalui Pendekatan Website Usability Evaluation*.
- Arief, Edwi. (n.d.). *Evaluasi Implementasi E-government Pada Situs Website Pemerintah Daerah di Indonesia: Perspektif konten dan Manajemen*.
- Azis. (2013). *Panduan Menguasai Internet Secara Otodidak*. Media Kita.
- Budi hartani. (n.d.). *Analisa Kualitas Website BPJS Kesehatan Dengan Metode Websitequal dan Importance-Performance Analysis*.
- Commonwealth of Australia, Department of Finance and Administration Financial Management Group. (1989). *Introduction to Cost-Benefit Analysis and Alternative Evaluation Methodologies*.
- Dunn, William N.,. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University.
- Hartono., A., W. ., (2015). *Partial Least Square (PLS)*.. Penerbit Andi.
- Haryani, Prita. (n.d.). *Evaluasi Kualitas Layanan e-government Pemerintah Kota Yogyakarta dengan e-govqual modifikasi*.
- Irawan, B., & Hidayat, M. N. (n.d.). *E-government: Konsep, esensi dan studi kasus*.
- Johandi, Dean. (n.d.). *Evaluasi Kualitas Informasi Situs Website Pemerintah Kota Bitung*.
- Layne, K., & Lee, J. W.. (2001). *Developing fully functional e-government: A four stage model*. *Government Information Quarterly*: Vol. 18(2).
- Lukmanul, H. (2004). *Website Merupakan Fasilitas Internet*. Gramedia.
- Marthasari dan Ismadianti. (n.d.). *Evaluasi Kinerja Website Pemerintah Provinsi Di Indonesia*.
- Masyhur, Firdaus. (n.d.). *Kinerja Website Resmi Pemerintah Provinsi di Indonesia*.
- Rachmadi, Aditya. (n.d.). *Evaluasi Situs Website Pemerintah Menggunakan Metode websitequal dan Importance-Performance Analysis (IPA) (Studi Kasus Kecamatan Lowokwaru-Malang)*.
- Ramli & Latan. (2013). *Model Persamaan Struktural Teori dan Implementasi*. CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wibawa, S. (2009). *Administrasi Negara; Isu-Isu Kontemporer*. Graha Ilmu.

Wiganti, Erni. (n.d.). *Analisis Kualitas Website dan Kepuasan Nasabah Terhadap Website Bank DKI*.

Wirawan. (2011). *Evaluasi:Teori,Model,Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Rajawali Pers.